



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099191/2019**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
4. Kode/Nama Satker : (099191) PENGADILAN NEGERI BINJAI
- Sebesar : Rp. 177.300.000 (SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 177.300.000
Rp. 177.300.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	177.300.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N II (123) Rp. 177.300.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

JAKARTA, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099191/2019
IA. INFORMASI KINERJA



DS:7281-3760-7922-0930

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (099191) PENGADILAN NEGERI BINJAI

Kuasa Pengguna Anggaran : LELI SUHENDRI, SH
Bendahara Pengeluaran : RAHMAD DIANSYAH SILALAH, SH
Pejabat Penanda Tangan SPM : JULINDA SE.,MH

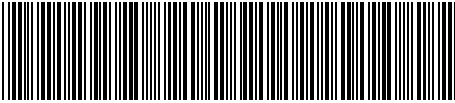
Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			177.300.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			177.300.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			177.300.000
Sasaran Program	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum			
Indikator Kinerja Program	01	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124495	Perkara	
	02	Pelaksanaan pelayanan peradilan umum	118766	Jam Layanan	
	03	Pembinaan tenaga teknis peradilan umum	800	Orang	
	04	Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	25	satker	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum			
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	124495	Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482	Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	118766	Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	3124	Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	0	Perkara	
	06	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	81	Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			177.300.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum			
	02	Pos bantuan hukum			
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung			
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu			
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
Output Kegiatan	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	312 Jam Layanan		31.200.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	118766	Jam Layanan	
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	300 Perkara		146.100.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	124000	Perkara	

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099191/2019
I B. SUMBER DANA



DS:7281-3760-7922-0930

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (099191) PENGADILAN NEGERI BINJAI

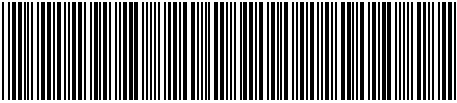
Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	177.300.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	177.300.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099191/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7281-3760-7922-0930

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (099191) PENGADILAN NEGERI BINJAI
Kewenangan : (KD)

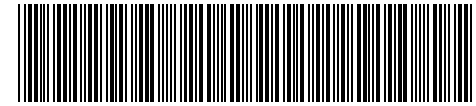
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI	-	177.300	-	-	-	177.300	07 . 53	
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	177.300	-	-	-	177.300		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	177.300	-	-	-	177.300		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	-	31.200	-	-	-	31.200		
01 RM		-	31.200	-	-	-	31.200		
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	146.100	-	-	-	146.100		
01 RM		-	146.100	-	-	-	146.100	123	
JUMLAH		-	177.300	-	-	-	177.300		

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099191/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7281-3760-7922-0930

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (099191) PENGADILAN NEGERI BINJAI

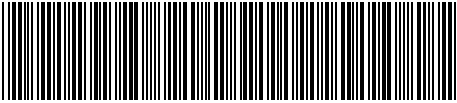
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.631	3.617	6.347	9.716	10.212	11.347	19.698	19.166	20.780	21.205	23.740	29.841	177.300
		52 BELANJA BARANG	1.631	3.617	6.347	9.716	10.212	11.347	19.698	19.166	20.780	21.205	23.740	29.841	177.300
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.631	3.617	6.347	9.716	10.212	11.347	19.698	19.166	20.780	21.205	23.740	29.841	177.300
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.631	3.617	6.347	9.716	10.212	11.347	19.698	19.166	20.780	21.205	23.740	29.841	177.300

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099191/2019
IV A. B L O K I R



DS:7281-3760-7922-0930

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [099191] PENGADILAN NEGERI BINJAI

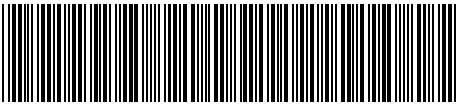
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099191/2019
IV B. C A T A T A N



DS:7281-3760-7922-0930

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [099191] PENGADILAN NEGERI BINJAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004